

Praktik Translingual dalam Komunikasi Politik Prabowo: Identitas dan Ideologi dalam Diskursus Pemerintahan

Akhmad Hairul Umam^{1*}

Kartika Aryani Harijono^{2*}

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tanri Abeng, Jakarta, Indonesia

Abstract

The phenomenon of translingual practices in Indonesian political communication has become increasingly prominent, especially since the election of Prabowo Subianto as President of the Republic of Indonesia in 2024. This study is significant as it explores how the strategic mixing of languages – Indonesian, English, Arabic, and local dialects – is employed not merely for communication, but to represent political identity and governmental ideology.

Adopting a qualitative case study approach, data were collected from official speeches, social media posts, and online news quotations spanning from December 2024 to August 2025.

The analysis utilized the frameworks of Critical Discourse Analysis (CDA) and translanguaging theory. The findings reveal that translingual practices in Prabowo's speeches strategically construct a multivocal political identity – nationalist, religious, and global.

This study affirms that language in politics functions as a symbolic tool of power, rich with ideological meaning.

Keywords

Translingual practice, Political Communication, Identity & Ideology.

Abstrak

Fenomena translingual dalam komunikasi politik Indonesia semakin menonjol, terutama sejak terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Penelitian ini menjadi penting karena memotret bagaimana praktik pencampuran bahasa – Indonesia, Inggris, Arab, dan bahasa lokal – digunakan sebagai strategi komunikasi yang tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga merepresentasikan identitas politik dan ideologi pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dari pidato resmi, unggahan media sosial, dan kutipan berita daring dari Desember 2024 hingga Agustus 2025.

Analisis dilakukan melalui kerangka *Critical Discourse Analysis* (CDA) dan teori *translanguaging*. Hasil menunjukkan bahwa translingual practices dalam pidato Prabowo secara strategis membentuk identitas politik yang multivokal – nasionalis, religius, dan global.

Penelitian ini menegaskan bahwa bahasa dalam politik adalah alat kekuasaan simbolik yang sarat makna.

Kata Kunci

Praktik translingual, Komunikasi politik, Identitas dan Ideologi

A. Pendahuluan

Dalam ranah linguistik politik kontemporer, praktik translingual (*translingual practice*) menjadi sorotan utama, khususnya dalam konteks komunikasi politik di negara multibahasa seperti Indonesia. *Translingual practice* tidak hanya merujuk pada penggunaan beberapa bahasa dalam satu ujaran atau wacana, tetapi lebih dari itu merupakan praktik sosial dan ideologis yang merefleksikan cara individu atau institusi menavigasi berbagai sistem bahasa untuk membentuk makna dan identitas (Canagarajah, 2013). Dalam konteks politik, bahasa tidak pernah netral. Ia membawa serta muatan ideologi, identitas, dan kekuasaan yang kompleks (Fairclough, 2010).

Komunikasi politik di era digital dan globalisasi mengalami transformasi signifikan. Para pemimpin politik kini tidak hanya berbicara kepada khalayak nasional tetapi juga kepada audiens global melalui media massa dan *platform* digital. Di sinilah praktik *translingual* menjadi strategi retorik dan simbolik untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat serta membentuk citra kepemimpinan yang inklusif dan berwawasan global. Di Indonesia, praktik ini terlihat menonjol dalam komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto, terutama sejak dilantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024.

Presiden Prabowo dikenal sebagai figur militer-politik yang juga menunjukkan kecakapan retorika yang khas. Dalam sejumlah pidato resminya—baik dalam peringatan hari besar nasional, peluncuran program pemerintah, maupun dalam wawancara dan unggahan media sosial—ia menggunakan berbagai bahasa secara bergantian dan strategis: Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, bahasa Inggris untuk istilah modern atau global seperti *digital transformation*, dan *aspiring middle class*, bahasa Arab seperti *bismillah* dan *insyaAllah* yang mencitrakan nilai religius, serta istilah lokal seperti *gotong royong*, dan *wong cilik* yang menekankan identitas ke-Indonesiaan. Prabowo sering melontarkan istilah unik dan tidak biasa dalam berbagai kesempatan saat berpidato untuk menggambarkan kondisi politik hingga ekonomi seperti *omon-omon*, *sorry ye*, *vampir ekonomi*, dan *serakahnomics*.

Praktik *translingual* dalam komunikasi politik Prabowo ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar kebiasaan linguistik. Sebaliknya, ini mencerminkan konstruksi wacana yang kompleks dan sengaja dibentuk untuk menyampaikan pesan politik secara efektif kepada berbagai kelompok masyarakat. Di satu sisi, penggunaan bahasa Arab memperkuat

kedekatan dengan kelompok Islam konservatif; di sisi lain, penggunaan bahasa Inggris menunjukkan komitmen pada modernisasi dan keterbukaan terhadap kerja sama internasional. Sementara itu, idiom lokal membangun kedekatan dengan masyarakat akar rumput.

Banyak studi sebelumnya telah membahas penggunaan bahasa dalam politik, terutama dalam konteks kampanye, debat, dan propaganda (Wodak & Meyer, 2016; van Dijk, 2006; Perdana & Umam, 2019; Umam et al., 2025). Namun, sedikit kajian yang secara eksplisit mengupas bagaimana perpaduan bahasa atau praktik translingual digunakan dalam wacana pemerintahan pasca-kemenangan, terutama oleh pemimpin seperti Prabowo yang memiliki latar belakang militer dan nasionalis, namun sekaligus ingin tampil religius dan adaptif terhadap globalisasi. Oleh karena itu, studi ini menjadi penting untuk melihat bagaimana bahasa digunakan bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membentuk identitas politik dan menegaskan ideologi pemerintahan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik translingual dalam pidato dan pernyataan publik Presiden Prabowo dari Oktober 2024 hingga Agustus 2025. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penggunaan berbagai bahasa dalam komunikasi politik merepresentasikan identitas politik (nasionalis, religius, global) dan ideologi pemerintahan (moderdinasi, populis dan legitimasi keagamaan).

Dengan menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) dan teori *translanguaging*, penelitian ini menyumbang pada wacana akademik mengenai hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan identitas dalam konteks komunikasi politik Indonesia. Kajian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi para pembuat kebijakan, analis komunikasi, dan publik luas dalam memahami bagaimana politik bahasa berperan dalam dinamika pemerintahan kontemporer.

B. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap fenomena translingual dalam komunikasi politik berada pada pertemuan antara ilmu linguistik, studi wacana kritis, dan ilmu komunikasi politik. Untuk memahami secara komprehensif praktik translingual dalam diskursus pemerintahan, khususnya pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, diperlukan telaah atas beberapa konsep kunci: *translingual practice*, konstruksi identitas melalui bahasa, dan penggunaan bahasa sebagai representasi ideologi dalam komunikasi politik.

1. *Translingual Practice* dalam Kajian Linguistik

Konsep *translingual practice* pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Canagarajah (2013) dalam bukunya *Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan Relations*. Dalam pandangan Canagarajah, translingualism bukan sekadar penggunaan dua atau lebih bahasa secara bergantian (code-switching), melainkan mencerminkan kemampuan individu atau kelompok untuk menggabungkan berbagai sumber linguistik dalam membentuk makna dan identitas sosial. Dalam konteks global, praktik translingual menandai pergeseran paradigma dari pendekatan monolingual ke pluralitas bahasa yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Garcia dan Wei (2014) menambahkan bahwa *translanguaging* melibatkan *the deployment of a speaker's full linguistic repertoire* yang digunakan untuk berkomunikasi secara efektif dalam interaksi sosial. Ini menjadi sangat relevan dalam konteks politik, di mana pemimpin publik harus menjangkau audiens yang beragam secara linguistik, ideologis, dan sosiokultural. Dalam hal ini, praktik translingual dapat dipahami sebagai strategi adaptif untuk menghubungkan berbagai identitas bahasa dalam satu ruang diskursif.

2. Bahasa dan Konstruksi Identitas Politik

Dalam tradisi *sociolinguistics* dan *discourse studies*, bahasa dipahami tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk dan menampilkan identitas. Menurut Bucholtz dan Hall (2005), identitas adalah hasil konstruksi diskursif yang ditampilkan melalui praktik-praktik linguistik dalam situasi sosial tertentu. Identitas politik, dalam hal ini, terbentuk melalui simbol-simbol linguistik yang diasosiasikan dengan kelompok sosial, nilai, atau ideologi tertentu.

Dalam konteks Indonesia, penggunaan bahasa Arab dalam wacana politik sering kali dikaitkan dengan identitas religius atau kedekatan dengan kelompok Islam konservatif, sedangkan penggunaan bahasa Inggris menunjukkan keterbukaan terhadap modernitas, globalisasi, dan profesionalisme (Umam et al., 2023). Di sisi lain, penggunaan istilah lokal seperti *gotong royong* atau *wong cilik* (rakyat kecil) merupakan representasi identitas nasionalis dan populis yang mengakar kuat dalam memori kolektif bangsa.

Presiden Prabowo dalam pidato-pidatonya kerap memainkan ketiga domain identitas ini—religius, nasionalis, dan global—melalui pilihan bahasa yang ia gunakan. Ini menunjukkan bagaimana bahasa digunakan secara performatif untuk membangun identitas politik yang multivokal (Pennycook, 2007).

3. Bahasa sebagai Representasi Ideologi dalam Komunikasi Politik

Studi *Critical Discourse Analysis* (CDA) menyoroti bahwa bahasa bukanlah media yang netral, melainkan sarat akan relasi kekuasaan dan ideologi (Fairclough, 2010; Wodak & Meyer, 2016). Dalam kerangka CDA, praktik kebahasaan dianalisis sebagai bagian dari struktur sosial yang merefleksikan dan sekaligus membentuk praktik

kekuasaan. Dalam konteks politik, pilihan bahasa tidak hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga melegitimasi ideologi di balik kebijakan tersebut.

Misalnya, penggunaan istilah seperti *food estate* dan *digital transformation* dalam pidato Prabowo menunjukkan adopsi wacana neoliberal dan modernisasi berbasis teknologi yang berasal dari Barat. Namun, istilah tersebut kemudian “dilokalkan” melalui penambahan frase seperti *demi rakyat* atau *berpihak pada bangsa sendiri*. Ini mencerminkan strategi *recontextualization* (Van Leeuwen, 2009), di mana wacana global disesuaikan dengan nilai-nilai lokal untuk meningkatkan penerimaan politik.

Fenomena ini juga menunjukkan keberadaan *ideological layering*, yaitu situasi di mana satu pernyataan politik dapat mengandung lebih dari satu lapis ideologi—misalnya modernisme dan nasionalisme—yang dinyatakan melalui pencampuran bahasa. Dalam konteks inilah praktik translingual menjadi penting untuk dianalisis, karena menjadi medium artikulasi dan negosiasi antara ideologi global dan lokal dalam ruang politik Indonesia.

4. Studi Terkait di Konteks Indonesia

Beberapa studi sebelumnya telah menyinggung penggunaan bahasa dalam komunikasi politik di Indonesia. Ardhan (2020), Astuti (2020) and Umam et al., (2025) melakukan analisis wacana terhadap pidato politik dan menemukan bahwa penggunaan istilah asing dalam pidato sering kali digunakan untuk menciptakan citra profesional dan modern, meskipun tidak selalu dapat dipahami oleh semua segmen masyarakat.

Sihabudin et al., (2023) dan Faradis et al., (2023) secara khusus menyoroti strategi komunikasi digital Prabowo di media sosial, yang memadukan bahasa Inggris dengan Bahasa Indonesia untuk menjangkau audiens muda. Namun, kedua studi ini belum secara eksplisit menggunakan kerangka translingualism maupun menganalisis peran ideologi dalam praktik bahasa campuran. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan perspektif translingual dan CDA dalam melihat praktik kebahasaan presiden sebagai bentuk representasi identitas dan kekuasaan simbolik.

Dengan menggabungkan kerangka teori translingual practice (Canagarajah, 2013; Garcia & Wei, 2014), konstruksi identitas (Bucholtz & Hall, 2005) serta analisis ideologi dalam bahasa (Fairclough, 2010), penelitian ini memosisikan diri dalam lintas disiplin linguistik kritis dan komunikasi politik. Dalam konteks komunikasi pemerintahan Presiden Prabowo, praktik translingual bukan sekadar gaya linguistik, tetapi bagian dari strategi simbolik untuk membentuk opini publik, melegitimasi kebijakan, serta meneguhkan posisi politik dalam lanskap demokrasi Indonesia yang semakin kompleks.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Objek kajian adalah praktik translingual dalam komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto selama tujuh bulan pertama pemerintahannya, dari Desember 2024 hingga Agustus 2025. Data dikumpulkan dari tiga sumber utama: (1) transkrip pidato resmi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden dan kanal TV nasional seperti TVRI dan Metro TV; (2) unggahan di media sosial (Instagram, X); dan (3) pemberitaan media daring (Kompas, Tempo, Republika, Antara) yang memuat kutipan langsung ucapan Presiden.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dan pemilihan *purposive sampling*, dengan memilih data yang secara eksplisit menunjukkan praktik baur bahasa atau penggunaan bahasa yang tidak seragam. Setiap data diberi kode identifikasi: P untuk pidato, S untuk media sosial, dan B untuk berita daring. Data kemudian dianalisis dalam tiga kelompok utama: (1) bentuk praktik translingual, (2) representasi identitas politik (nasionalis, religius, global), dan (3) strategi ideologis dalam pilihan bahasa.

Analisis dilakukan menggunakan kerangka kerja *Critical Discourse Analysis* (Fairclough, 2010) dengan tahapan: (1) analisis tekstual terhadap unsur bahasa campuran, (2) analisis diskursif untuk mengidentifikasi relasi kekuasaan dan ideologi di balik pilihan bahasa, dan (3) analisis sosial untuk melihat bagaimana wacana tersebut berinteraksi dengan konteks politik Indonesia.

D. Hasil Penelitian

Table 1
Praktik Translingual dalam Komunikasi Politik Prabowo

No	Sumber Data	Jumlah	Persentase (%)	Analisis Kriteria Inklusi		
				Translingual	Identitas	Ideologi
1	Pidato resmi	15	20%	Ada segmen yang memadukan dua+ bahasa (mis. ID-EN/ID-AR), terekam/tertranskrip lengkap	Nasionalis Penguatan identitas kebangsaan dengan istilah internasional	Modernisasi Menegaskan orientasi ke masa depan dan modernitas
2	Unggahan media sosial	35	47%	Teks/caption/komentar yang eksplisit menunjukkan campur/alih kode	Religius Legitimasi religius melalui sisipan Arab	Populis Menciptakan kedekatan dengan publik mudaID-AR
3	Kutipan berita daring	25	33%	Kutipan langung (direct quote) dari narasumber yang menampilkan campur/alih kode	Global Identitas cosmopolitan, terhubung isu global	Legitimasi Keagamaan Memperkuat legitimasi moral dan keagamaan

Total	75	100%
-------	----	------

Penelitian ini menemukan bahwa praktik translingual dalam pidato politik Prabowo terdistribusi ke dalam tiga ranah utama, yaitu pidato resmi, unggahan media sosial, dan kutipan berita daring (lihat tabel 1). Dari total 75-unit data, sebanyak 15 data (20%) berasal dari pidato resmi. Dalam konteks ini, translingual muncul melalui segmen yang memadukan dua bahasa atau lebih, seperti kombinasi Indonesia-Inggris maupun Indonesia-Arab. Praktik ini digunakan untuk memperkuat identitas nasionalis sekaligus menampilkan kesan modernisasi melalui penggunaan istilah internasional yang memberi bobot legitimasi global pada wacana kebangsaan.

Selanjutnya, 35 data (47%) ditemukan dalam unggahan media sosial. Bentuk translingual di sini tampak dalam teks, *caption*, maupun komentar yang secara eksplisit menampilkan campur atau alih kode. Strategi ini berkaitan erat dengan penguatan identitas religius, misalnya melalui penyisipan kosakata Arab yang berfungsi sebagai legitimasi keagamaan. Praktik ini sekaligus memperlihatkan kecenderungan populis, di mana kedekatan dengan bahasa dan simbol keagamaan dipakai untuk menjangkau basis massa yang religius.

Sementara itu, 25 data (33%) bersumber dari kutipan berita daring. Pada kategori ini, translingual muncul dalam kutipan langsung yang menampilkan campuran bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Analisis menunjukkan bahwa strategi ini digunakan untuk membangun identitas global yang bersifat kosmopolitan dan menempatkan Prabowo sebagai figur yang terhubung dengan isu-isu internasional. Dalam ranah ideologis, praktik ini juga menunjukkan dimensi legitimasi religius, memperkuat citra politisi yang mampu menyelaraskan diri dengan nilai-nilai keagamaan sekaligus global.

Secara keseluruhan, temuan ini mengindikasikan bahwa praktik *translingual* dalam pidato politik Prabowo tidak semata-mata berfungsi sebagai variasi linguistik, tetapi juga sebagai strategi komunikasi politik. Translingualitas menjadi medium untuk memadukan identitas nasionalis, religius, dan global serta membangun ideologi modernisasi, populisme, dan legitimasi religius. Dengan demikian, bahasa berfungsi ganda; sebagai sarana ekspresi kebangsaan dan keagamaan, sekaligus instrumen simbolik untuk memperkuat posisi politik di level nasional maupun internasional.

E. Pembahasan

Kode Data 1: S-07

"Saya mau kirim lah nanti ke Refly Harun atau ke siapa, Rocky Gerung. *Tell me what is wrong*,". Prabowo
Sumber: Postingan Republika. Co.id di X

Pernyataan Prabowo, "*Saya mau kirim lah nanti ke Refly Harun atau ke siapa, Rocky Gerung. Tell me what is wrong*," menunjukkan praktik translanguaging sekaligus strategi wacana politik. Translanguaging di sini tampak dari penyisipan bahasa Inggris "*Tell me*

what is wrong” di tengah tuturan berbahasa Indonesia. Alih bahasa semacam ini tidak dapat dilihat sekadar fenomena linguistik, melainkan sebagai praktik ideologis yang sarat makna sosial.



Gambar 1 Postingan Republika.co.id di X

Menurut Garcia dan Wei (2014), translanguaging merupakan praktik sosial di mana penutur secara dinamis mengombinasikan repertoar bahasa untuk menegosiasikan makna dan identitas. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa Inggris oleh Prabowo berfungsi untuk: 1). Menunjukkan otoritas dan modernitas, dengan membangun citra kosmopolitan dan global. Pemimpin politik yang fasih menyisipkan bahasa asing sering dipersepsikan sebagai figur berwawasan internasional (Canagarajah, 2013). 2). Memberi tekanan emosional dan retorik. Frasa *“Tell me what is wrong”* terasa lebih lugas dan tegas dibanding padanan bahasa Indonesia (*“Kasih tahu saya apa yang salah”*), sehingga menguatkan kesan tantangan dan keterbukaan. 3). Memperluas jangkauan audiens. Sisipan bahasa Inggris menyasar kalangan urban dan intelektual yang akrab dengan wacana global, sekaligus tetap dimengerti oleh massa nasionalis.

Dalam kerangka *Critical Discourse Analysis* ala Fairclough (2010), bahasa dipahami sebagai praktik sosial yang membentuk relasi kuasa. Pernyataan Prabowo dapat dibaca dalam tiga dimensi: 1). Teks: Penyebutan nama Refly Harun dan Rocky Gerung adalah bentuk intertekstualitas, menghadirkan oposisi kritis langsung ke dalam ucapannya. Dengan mengatakan *“Tell me what is wrong”*, Prabowo menegaskan posisi dominan: ia tidak hanya menerima kritik, tetapi menantang lawan wacana untuk membuktikan klaim mereka. 2). Praktik Diskursif: Ucapan ini muncul dalam konteks tagar #indonesiagelap yang ramai di media sosial, sebuah arus wacana digital yang menekan legitimasi pemerintah. Dengan merespons langsung isu tersebut, ia berusaha menguasai arus wacana publik. 3). Praktik Sosial: Mengundang dialog dengan pengkritik dapat dibaca sebagai strategi hegemonik (Gramsci, 1971). Ia menampilkan diri sebagai pemimpin terbuka,

namun tetap mengontrol bingkai percakapan. Translanguaging di sini menjadi simbol kapital kultural (Bourdieu, 1991), menegaskan status elit global dan memperkuat legitimasi politik.

Dengan demikian, translanguaging dalam pernyataan ini tidak netral. Ia adalah strategi wacana yang menggabungkan dimensi identitas, emosi, dan legitimasi. Sisipan bahasa Inggris membangun citra pemimpin modern, sekaligus menjadi perangkat retorik untuk memosisikan diri sebagai aktor dominan yang berani menerima kritik. Wacana semacam ini memperlihatkan bagaimana praktik bahasa berfungsi ganda yaitu sebagai medium komunikasi, sebagai instrumen politik, dan sebagai simbol kapital sosial-intelektual yang memperkuat posisi dalam kontestasi wacana.

Kode Data 2: B-09

"Ini saya beri nama. Serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu, tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih *warning* berkali-kali sekian bulan, tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang" Prabowo
Sumber: www.kompas.com

Pernyataan Prabowo dengan istilah "*Serakahnomics*" merepresentasikan praktik translanguaging berupa permainan bahasa (wordplay) antara kosa kata Indonesia (*serakah*) dan sufiks bahasa Inggris *-nomics*. Istilah ini merupakan bentuk hibrid yang menggabungkan ekspresi lokal dengan terminologi global ekonomi. Garcia dan Wei (2014) menegaskan bahwa translanguaging tidak sekadar pencampuran bahasa, tetapi juga penciptaan makna baru yang menegosiasikan identitas dan ideologi. Dengan menciptakan istilah ini, Prabowo melakukan simplifikasi diskursus ekonomi menjadi wacana moral: keserakahan sebagai akar persoalan.



Figure 1 Prabowo Blak-blakan Sebut Indonesia Gelap Didanai Koruptor
Sumber: KOMPASTV

Dari sudut pandang *Critical Discourse Analysis*, istilah ini berfungsi sebagai strategi retorik untuk mengkritik sistem ekonomi neoliberal atau praktik kapitalisme yang dianggap

eksploitatif. Fairclough (2010), menekankan bahwa bahasa dalam wacana politik membentuk representasi realitas sosial. Sementara pernyataan yang kedua, *"saya sudah kasih warning..."* menegaskan relasi kuasa: Prabowo menampilkan diri sebagai otoritas yang berhak menegur dan menindak. Secara sosial, ini adalah praktik hegemonik (Gramsci, 1971), yaitu membangun kesadaran kolektif untuk menentang "ekonomi serakah" sekaligus meneguhkan legitimasi kepemimpinan. Dengan demikian, translanguaging dan wacana dalam pernyataan ini bekerja sama untuk menciptakan citra populis: pemimpin tegas yang melawan elite serakah dan berpihak pada rakyat.

Kode Data 3: B-03

"Ya jadi leadership... ing ngarsa sung tuladha... omong, omon-omon, tak bisa" Prabowo
Sumber: www.liputan6.com

Pernyataan Prabowo *"Ya jadi leadership... ing ngarsa sung tuladha... omong, omon-omon, tak bisa"* memperlihatkan praktik translanguaging dengan menggabungkan bahasa Indonesia, istilah Inggris (*leadership*), dan bahasa Jawa klasik (*ing ngarsa sung tuladha*). Praktik ini menunjukkan bagaimana pemimpin memanfaatkan seluruh repertoar linguistik untuk membangun makna yang kaya (García & Wei, 2014). Kata *leadership* memberi nuansa modern dan global, sementara ungkapan Jawa menghadirkan kedekatan dengan kearifan lokal serta legitimasi budaya.



Gambar 2 Pidato Kenegaraan Prabowo Menjelang HUT RI ke-80
Sumber: www.liputan6.com

Dalam kerangka *Critical Discourse Analysis*, bahasa digunakan untuk membingkai citra kepemimpinan. Menurut Fairclough (2010), pilihan bahasa membentuk representasi realitas sosial. Prabowo menegaskan bahwa kepemimpinan sejati harus berbasis teladan, bukan sekadar retorika (*omon-omon*). Penyisipan ungkapan Jawa memperkuat ethos nasionalis-tradisional, sementara istilah Inggris memberi resonansi kosmopolitan. Praktik ini juga merefleksikan strategi hegemonik (Gramsci, 1971), mengikat nilai tradisi dan

modernitas dalam satu wacana untuk memperluas legitimasi. Dengan demikian, translanguaging di sini menjadi instrumen politik: bahasa Inggris menandai globalitas, bahasa Jawa menegaskan akar budaya, dan bahasa Indonesia menjadi medium utama. Kombinasi ini membangun citra pemimpin yang modern sekaligus berakar pada tradisi.

Kode Data 4: P-08

(*"if you see a difficulty... run towards the problem"*). Prabowo

Sumber: <https://setkab.go.id>

Pernyataan Prabowo menampilkan praktik translanguaging melalui penyisipan bahasa Inggris (*"if you see a difficulty... run towards the problem"*) di tengah tuturan bahasa Indonesia. Praktik ini tidak hanya fungsi linguistik, tetapi juga strategi simbolik untuk membangun citra kepemimpinan kosmopolitan dan otoritas intelektual. García & Wei (2014) menegaskan bahwa translanguaging memungkinkan penutur memanfaatkan seluruh repertoar bahasa untuk menegosiasikan makna dan identitas. Dengan menggabungkan dua bahasa, Prabowo menampilkan diri sebagai pemimpin modern yang mampu merespons tantangan lokal sekaligus berwawasan global.

Dalam perspektif *Critical Discourse Analysis*, bahasa berfungsi sebagai instrumen kuasa (Fairclough, 2010). Struktur repetitif *"do not run away... run towards..."* memperkuat pesan moral bahwa pemimpin ideal menghadapi, bukan menghindari, masalah. Penyisipan bahasa Inggris menambah daya retorik, membangun ethos kepemimpinan yang berani, visioner, dan terbuka. Pada level sosial, wacana ini juga mencerminkan strategi hegemonik (Gramsci, 1971), yakni membangun legitimasi dengan menanamkan nilai universal kepemimpinan kepada publik. Dengan demikian, translanguaging tidak netral, tetapi menjadi medium politik yang mengikat identitas nasional dan kosmopolitan sekaligus mengukuhkan posisi dominan pembicara.

Kode Data 5: P-01

"Tentunya kita sebagai insan yang bertakwa tidak henti-hentinya memanjakan puji syukur ke hadirat Tuhan Mahakuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam *Allah Subhanahu wa ta'ala*, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita hadir di Sidang Kabinet Paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat." Prabowo

Sumber: www.kompas.com

Pernyataan Prabowo menampilkan praktik translanguaging melalui percampuran istilah religius dalam bahasa Indonesia dan Arab, khususnya frasa *"Allah Subhanahu wa ta'ala"*. Translanguaging di sini tidak hanya menghadirkan kosakata lintas bahasa, tetapi juga memperkuat dimensi identitas religius dan spiritual. García & Wei (2014) menegaskan bahwa translanguaging memungkinkan penutur mengintegrasikan seluruh repertoar linguistik untuk tujuan identitas dan legitimasi. Dengan menyisipkan bahasa Arab di tengah bahasa Indonesia formal, Prabowo menegaskan dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan nilai Islam sekaligus menjaga legitimasi di hadapan mayoritas Muslim.

Dalam kerangka *Critical Discourse Analysis*, bahasa digunakan sebagai instrumen kuasa dan ideologi (Fairclough, 2010). Penyebutan atribut Tuhan dengan variasi sebutan (*Tuhan Mahakuasa, Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa ta'ala*) membangun repetisi retorik yang mengukuhkan citra religius dan moralitas pemimpin. Secara sosial, praktik ini merefleksikan strategi hegemonik (Gramsci, 1971), untuk mengikat kesadaran kolektif pada basis religius, memperkuat solidaritas nasional melalui legitimasi spiritual. Dengan demikian, translanguaging di sini berfungsi ganda yaitu memperluas makna religius melalui bahasa Arab, sekaligus membangun citra pemimpin yang bertakwa, bermoral, dan berakar pada nilai mayoritas.

Kode Data 6: P-07

“tidak disebut miskin, tetapi prasejahtera... istilah ilmiahnya adalah *aspiring middle class*” menampilkan praktik translanguaging dengan mencampurkan bahasa Indonesia (*miskin, prasejahtera*) dan istilah bahasa Inggris akademik (*aspiring middle class*). Prabowo
Sumber: <https://www.antaranews.com>

Pernyataan Prabowo “tidak disebut miskin, tetapi prasejahtera... istilah ilmiahnya adalah *aspiring middle class*” menampilkan praktik translanguaging dengan mencampurkan bahasa Indonesia (*miskin, prasejahtera*) dan istilah bahasa Inggris akademik (*aspiring middle class*). Translanguaging di sini berfungsi sebagai strategi diskursif untuk mengonstruksi makna sosial-ekonomi: ia mereduksi stigma “miskin” menjadi label yang lebih halus, sekaligus menghubungkan wacana lokal dengan istilah global (García & Wei, 2014). Penyisipan istilah Inggris menghadirkan citra intelektual dan kosmopolitan, menandai otoritas pengetahuan ekonomi modern.

Dalam perspektif *Critical Discourse Analysis*, praktik ini memperlihatkan bagaimana bahasa membingkai realitas sosial (Fairclough, 2010). Penggantian istilah “miskin” menjadi “prasejahtera” atau “*aspiring middle class*” bukan netral, melainkan praktik ideologis: ia mengubah persepsi publik tentang kemiskinan menjadi narasi optimis. Secara sosial, ini dapat dibaca sebagai strategi hegemonik (Gramsci, 1971), yakni menggeser wacana dari problem struktural kemiskinan menjadi aspirasi kelas menengah. Dengan demikian, translanguaging di sini bukan sekadar percampuran bahasa, tetapi instrumen politik untuk menormalisasi kondisi sosial-ekonomi dengan istilah yang lebih positif, sekaligus meneguhkan posisi Prabowo sebagai pemimpin yang menguasai baik wacana lokal maupun global.

Pencampuran bahasa juga berfungsi untuk mengakomodasi keragaman audiens: dari kelompok elite intelektual, komunitas Islam konservatif, hingga masyarakat akar rumput. Ini memperlihatkan pemahaman yang cermat tentang segmentasi khalayak dan strategi komunikasi politik yang adaptif. Dengan menggabungkan berbagai bahasa, Prabowo membangun identitas politik multivokal—ia berbicara sebagai negarawan global, tokoh nasionalis, dan pemimpin religius sekaligus.

F. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik translingual dalam komunikasi Presiden Prabowo merupakan strategi linguistik dan politik yang kompleks. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dikombinasikan dengan bahasa Inggris, Arab, dan istilah lokal menunjukkan bahwa bahasa tidak sekadar alat komunikasi teknis, tetapi juga berfungsi sebagai simbol identitas politik yang multivokal. Bahasa Arab digunakan untuk membangun citra religius dan menciptakan kedekatan dengan kelompok Islam konservatif; bahasa Inggris digunakan untuk mencitrakan modernitas, profesionalisme, dan keterbukaan terhadap dunia global; sementara istilah lokal memperkuat nasionalisme dan kedekatan dengan masyarakat akar rumput.

Praktik translingual dalam komunikasi politik Prabowo ini juga digunakan untuk membingkai berbagai agenda kebijakan dan visi ideologis pemerintah. Istilah seperti *digital transformation* dan *serakahnomics* dimunculkan dalam wacana resmi sebagai bagian dari representasi ideologis yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi dan moral. Namun istilah tersebut tidak dibiarkan sebagai jargon asing semata, melainkan diikuti dengan penjelasan atau padanan dalam bahasa lokal untuk menjaga keterhubungan dengan nilai-nilai nasional dan keindonesiaan. Dengan demikian, Presiden Prabowo berhasil menciptakan jembatan simbolik antara diskursus global dan wacana lokal melalui bahasa.

Secara teoretis, penelitian ini mengukuhkan relevansi *translingual practice* dan CDA dalam studi komunikasi politik multibahasa. Bahasa dalam politik terbukti memainkan peran penting dalam pembentukan identitas simbolik dan konstruksi wacana kekuasaan. Secara praktis, temuan ini memberikan wawasan berharga bagi politisi, praktisi komunikasi, dan akademisi mengenai pentingnya strategi kebahasaan dalam membangun kepercayaan publik, melegitimasi kebijakan, serta membentuk narasi kepemimpinan yang inklusif dan adaptif di era globalisasi dan disrupsi digital.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik translingual bukanlah sekadar fenomena linguistik semata, melainkan merupakan bagian integral dari strategi komunikasi politik yang efektif dalam konteks pemerintahan Indonesia masa kini. Penelitian ini membuka ruang bagi studi lanjutan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari translingual practices terhadap persepsi publik, keefektifan kebijakan, dan pembentukan identitas nasional dalam era pemerintahan digital.

G. Daftar Pustaka

Ardhan, D. T. (2020). *Analisis Bahasa Politik Anies Baswedan Dalam Pidato Pengukuhanannya Sebagai Gubernur Jakarta Periode 2017-2022*. *Etnolingual*, 4(1), 27-42.

<https://doi.org/10.20473/etno.v4i1.17762>

- Astuti, H. Y. (2020). *Analisis Wacana Kritis Pada Pidato Politik Mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Critical Discourse Analysis on Political Speech By the Former Head of Golkar, Abu Rizal Bakrie)*. *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 10(2), 167. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v10i2.9374>
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Polity Press.
- Bucholtz, M., & Hall, K. (2005). *Identity and Interaction: a Sociocultural Linguistic Approach*. *Discourse Studies*, 7(4-5), 585-614. <https://doi.org/10.1177/1461445605054407>
- Canagarajah, S. (2013). *Translingual Practice: Global Englishes and Cosmopolitan Relations*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203073889>
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis "The Critical Study of Language"* (2nd ed.). Routledge.
- Faradis, N., Ainya, N., Fauzah, A., Ichsan, M., & Anshori, A. (2023). *Media Sosial dan Persepsi Publik: Analisis Strategi Kampanye Digital Calon Presiden Indonesia 2024*. *Prosiding Seminar Nasional*, 643-652.
- Garcia, O., & Wei, L. (2014). *Translanguaging: Language, bilingualism, and education*. Palgrave Macmillan.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks*. International Publishers.
- Pennycook, A. (2007). *Global Englishes and Transcultural Flows* (London (ed.)). Routledge.
- Perdana, K. E., & Umam, A. H. (2019). *Analisis Deskriptif Sosial Media Twitter dalam Proses Pembentukan Opini Kampanye Gubernur Jawa Barat 2018 dalam 30 Hari Pertama*. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, IX(2), 1-14.
- Sihabudin, M. M. R., Laila, H. N. A., Kharis, K., Rismayanti, & Fatimah, R. S. (2023). *Strategi Positioning "Gemoy" Prabowo Media Digital*. *Humanus*, 1(1), 146-154.
- Umam, A. H., Sugiharto, S., & Manara, C. (2023). *Translingual practice in remote EFL tertiary education: How Multilingual Speakers Create Translanguaging Spaces*. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 13(2), 258-269. <https://doi.org/10.17509/ijal.v13i2.63065>
- Umam, A. H., Sugiharto, S., & Nisa, B. (2025). *Translingual Practice as a Rhetorical Tactic in the 2024 Gubernatorial Election Debates*. *Journal of Applied Linguistics and Literature*, 10(2), 392-411. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/joall.v10i2.43127>
- van Dijk, T. A. (2006). *Politics, Ideology, and Discourse*. In R. Wodak (Ed.), *Advance in Critical Discourse Studies*. Palgrave Macmillan.
- Van Leeuwen, T. (2009). *Discourse as the Recontextualization of Social Practice: A Guide*. Dalam Ruth Wodak dan Michael Meyer (Eds), *Methods of Critical Discourse Analysis*, 2ed. SAGE Publications.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2016). *Methods of Critical Discourse Studies*. SAGE.

